



REPUBLIK INDONESIA



Kementerian PPN/
Bappenas

KEYNOTE SPEECH
SEMINAR NASIONAL
AGENDA REFORMASI REGULASI: MENATA FUNGSI DAN KELEMBAGAAN
SISTEM PERATURAN PERUNDANGAN INDONESIA

**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**Disampaikan dalam acara Seminar Nasional
Jakarta, 13 Februari 2019**



Reformasi Regulasi adalah perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas regulasi, baik secara individual maupun integral dalam suatu sistem regulasi yang komprehensif dan utuh.

*Strategi Nasional Reformasi Regulasi,
Bappenas, 2015.*



Overview Kondisi Regulasi Di Indonesia

Indonesia memiliki lebih dari 150.000 regulasi dan masih banyak regulasi yang tidak terdeteksi oleh para pembuat kebijakan. Pada saat ini proses identifikasi dan inventarisasi masih terus dilakukan

| | | |
|--|-----------------|---|
|  <p>SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA setkab.go.id</p> | 22.268 Regulasi | UU,PP, Inpres, Perpres, Kepres, Permen Setneg |
|  <p>PENGAYOMAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI peraturan.go.id</p> | 50.548 Regulasi | UU, Tap MPR, PP, Inpres, Perpres, Kepres, Permen |
|  <p>jdhn.bphn.go.id</p> | 80.090 Regulasi | UU, Tap MPR, PP, Inpres, Perpres, Kepres, Permen dan Statblad |
|  <p>KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI setneg.go.id</p> | 2.450 Regulasi | UU, Tap MPR, PP, Inpres, Perpres, Kepres, Permen |



18 Definisi
Regulasi yang
berbeda terkait
UMKM



23 Kementerian/
Lembaga
pengelola UMKM



Minimnya kordinasi antar
Kementerian/Lembaga
pengelola UMKM

EODB

2017
72

2018
73

Starting a Business

144

134

Dealing with Construction Permits

108

112

Registering Property

106

100

Getting Electricity

38

33

Paying Taxes

114

112

Getting Credit

55

44

Protecting Minority Investors

43

51

Trading Across Borders

112

116

Enforcing Contracts

145

146

Resolving Insolvency

38

38



Peraturan Untuk
Proses Pra
Pendaftaran

Peraturan Untuk
Proses Pasca
Pendaftaran

UU : 9

UU : 1

PP: 2

PP: 5

PERPRES: 4

PERPRES: 1

PERMEN: 20

PERMEN: 8



Biaya Yang Lebih Tinggi
Untuk Memulai Bisnis



Lebih Banyak Waktu
Untuk Memulai Bisnis



Lebih Banyak Prosedur
Sebelum Memulai Bisnis

Kewenangan dalam proses pembentukan regulasi tersebar di 4 Kementerian dan 1 Lembaga di tingkat Nasional dan secara khusus ada di setiap Pemerintah Daerah pada tingkat Propinsi dan Kabupaten/ Kota.



Minimnya proses sinkronisasi dan harmonisasi pembentukan regulasi di setiap K/L dan Pemda



Lemahnya sinergi kebijakan dan regulasi. Monitoring dan Evaluasi serta *Impact Assessment*



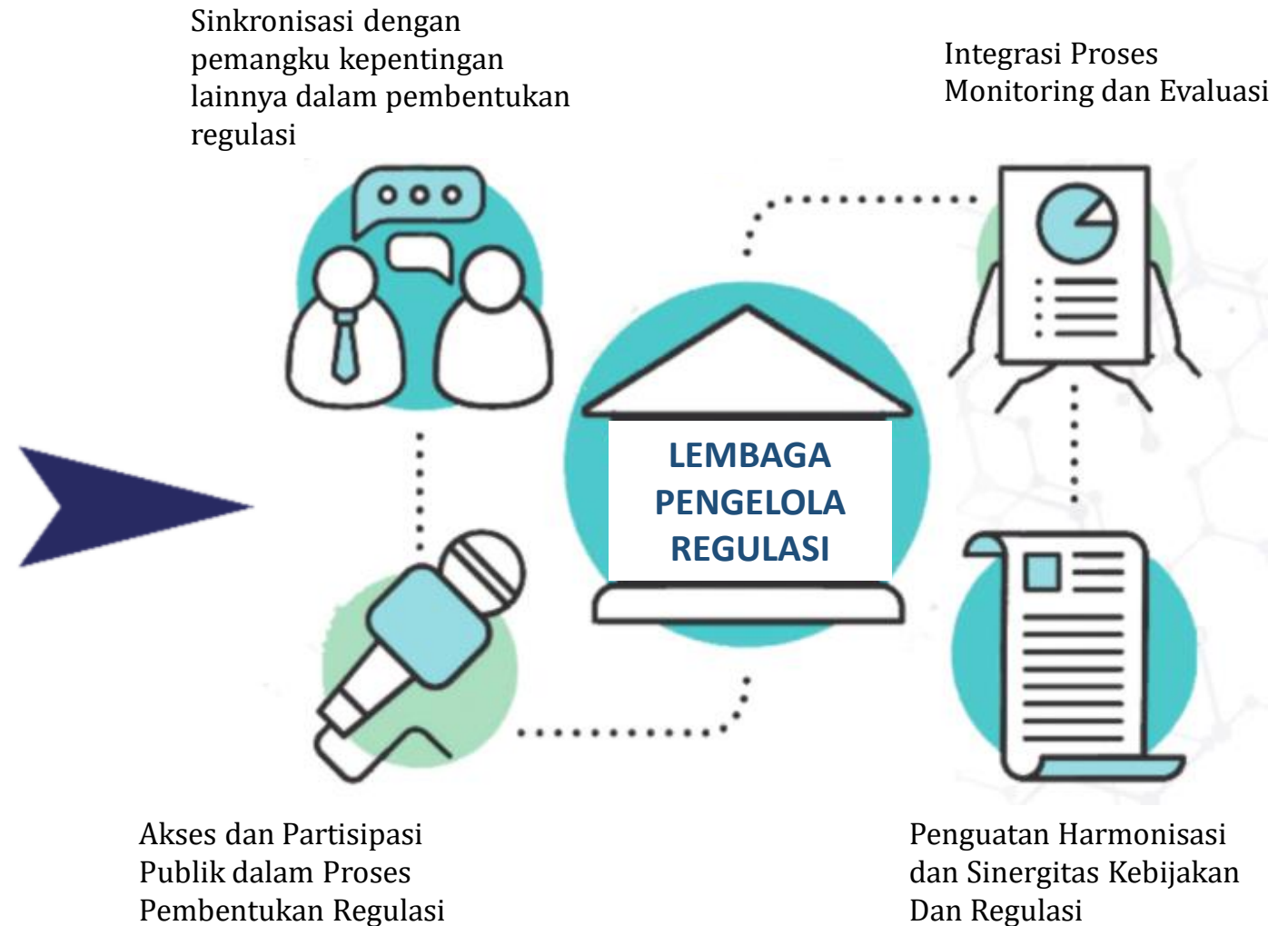
Perencanaan regulasi tidak didukung dengan analisis kebijakan yang mendalam serta *evidence based approach*



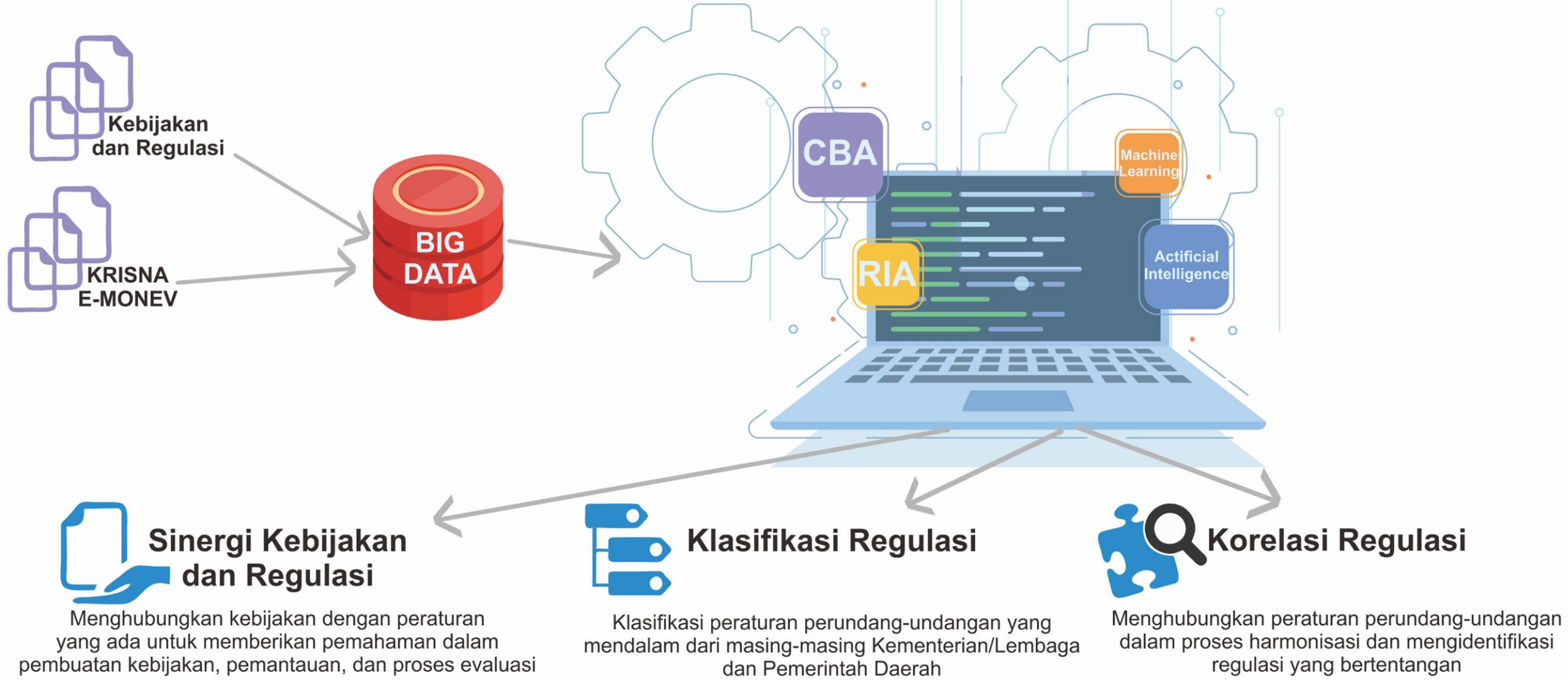
Lemahnya Peran Kelembagaan dan Minimnya Penguatan Sistem Pendukung



Regulasi kurang dinamis dalam mengakomodasi perkembangan teknologi / kebutuhan sosial masyarakat



Bantuan *Artificial intelligence* menghubungkan data terkait kebijakan dan regulasi yang ada, dengan cara visioner untuk membantu sinergi kebijakan dan regulasi



TERIMA KASIH